



Dinamika Pelayanan Administratif Pemerintahan: Analisis Beban Administrasi Sebagai Hambatan dalam Menjalankan Pelayanan Publik (Studi Kasus Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah)

A'an Ilham Ardiyansah¹ Aliph Ramahadi Wicaksana² Muhammad Hadi Alfianto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 08 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Abstrak ini membahas peran kritis pelayanan publik dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, sambil mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menghambat efektivitasnya. Kendala aksesibilitas informasi dan pelayanan, kompleksitas birokrasi, serta masalah korupsi dan praktik tidak etis di dalam lembaga menjadi fokus utama. Penelitian ini mencakup solusi potensial seperti peningkatan akses informasi melalui kampanye penyuluhan, reformasi birokrasi untuk transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, serta penguatan pengawasan dan tindakan tegas terhadap korupsi. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam dan solusi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelayanan publik.

Keywords: *Beban Administrasi, Pelayanan Publik, Hambatan*

(*) Corresponding Author:

aanilhamardiyansah@students.unnes.ac.id

ramahadialiph@students.unnes.ac.id

hadialfian@students.unnes.ac.id

How to Cite: Ardiyansah, A., Wicaksana, A., & Alfianto, M. (2024). Dinamika Pelayanan Administratif Pemerintahan: Analisis Beban Administrasi Sebagai Hambatan dalam Menjalankan Pelayanan Publik (Studi Kasus Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 154-163. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13361496>

PENDAHULUAN

Pelayanan publik terbaik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terkadang beban administratif yang berat dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji anteseden tingginya beban operasional pelayanan ESDM dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Dinas ESDM memegang peranan penting dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral Indonesia. Namun dalam upayanya memenuhi tuntutan masyarakat sebaik-baiknya, lembaga ESDM menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah beban administratif. Hal ini terlihat pada program-program yang dibuat oleh Dinas ESDM antara lain Program Pelayanan Administrasi Dinas, peningkatan sarana dan prasarana Badan, peningkatan kapasitas sumber daya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES),
Email: [@aanilhamardiyansah@students.unnes.ac.id](mailto:aanilhamardiyansah@students.unnes.ac.id)

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES),
Email: ramahadialiph@students.unnes.ac.id

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES),
Email : hadialfian@students.unnes.ac.id

Badan, pengembangan sistem informasi operasional dan pembiayaan, serta penguatan sistem informasi daerah. kapasitas pengelolaan keuangan.⁴

Selain itu, hambatan dan insentif terhadap layanan ESDM juga harus dipertimbangkan. Beban administratif yang berlebihan dapat menghambat pemberian layanan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menemukan penyebab beban administratif tersebut dan mencari solusi yang tepat.⁵

Dalam konteks yang lebih luas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk penghapusan peraturan dan perizinan ilegal. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral. Namun kemampuan mengatasi beban pengelolaan tingkat layanan ESDM tetap diperlukan.

Melalui observasi ke depan, kami berharap dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menambah beban administrasi departemen ESDM dan menemukan solusi tepat untuk mengatasinya. Dengan cara ini, kami berharap dapat mengoptimalkan pelayanan Departemen ESDM agar lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian Normatif-Empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam bentuk norma atau aturan dan juga penerapan daripada hukum itu sendiri di dalam masyarakat. Dalam penelitian Normatif-Empiris penelitian sendiri mengkaji implementasi dari sebuah norma atau aturan, implementasi dari peraturan tersebut adalah implementasi *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat tujuannya untuk memastikan apakah sebuah norma hukum seperti peraturan perundang-undangan dapat terimplementasi dengan baik atau tidak dalam masyarakat. Metode penelitian Normatif-Empiris memiliki dua sumber data yakni primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini bersumber pada wawancara pada dinas terkait yaitu dinas ESDM sedangkan untuk data sekunder penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada penelitian sebelumnya baik berbentuk jurnal maupun buku, selain itu sumber data primer pada penelitian ini juga bersumber pada peraturan-peraturan seperti peraturan perundang-undangan dan lain lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Administrasi dalam Lembaga Pemerintahan

⁴ amir. (2020). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Study of Scienific and Behavioral Management*, 1(2), 15-28.

⁵ Perubahan rencana strategis perangkat daerah (renstra pd. (n.d.).

⁶ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. (2016). KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 01, 1-23.

Dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip *good governance* pemerintah wajib melakukan kewajibannya salah satunya adalah melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷ Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan oleh semua organ negara dalam semua tingkat baik dalam skala pusat maupun pada tingkat daerah seperti provinsi dan pemerintahan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menjalankan pelayanan publik yang baik pemerintah harus berpedoman pada prinsip *Good Governance*. Pertama dalam prinsip *Good Governance* sendiri bertujuan untuk membuat sistem pemerintahan yang efektif dalam hal ini pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan harus sesuai dengan apa yang dicanangkan dalam program, efisien artinya hemat dan sesuai dengan rencana tanpa adanya beban tambahan, transparan yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja dapat dilihat dan diawasi dan dapat dinilai apakah suatu pekerjaan tersebut baik atau tidak, dan yang terakhir adalah akuntabel yang artinya segala kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan serta pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka laksanakan kepada masyarakat.⁸

Namun apakah sebuah pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan? Tentu saja tidak dalam menjalankan fungsi pelayanan publik pemerintah kerap kali menemui hambatan yang menghalangi untuk menjalankan pelayanan publik yang optimal misalnya permasalahan birokrasi. Penyakit dalam birokrasi sendiri sudah menjadi hal yang sangat lumrah di Indonesia contoh dari masalah birokrasi di Indonesia sendiri adalah seperti terdapat kelambanan dalam pelayanan publik, adanya masalah suap dalam pelayanan izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk yang cenderung tidak efisien, bahkan boros dalam pengelolaan anggaran yang dalam ilmu administrasi negara Caiden menyebutnya dengan istilah patologi birokrasi. Patologi birokrasi sendiri adalah istilah yang menggambarkan kekacauan dalam sistem birokrasi yang bahkan mengakibatkan disfungsi. Patologi birokrasi di Indonesia sendiri telah mencapai sesuatu yang parah dan mendarah daging dalam sistem birokrasi di Indonesia baik pada tingkat pusat hingga tingkat daerah mulai dari eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif. Dampak dari patologi birokrasi tersebut adalah berdampak pada pelayanan masyarakat misalnya pada pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara baik namun pada faktanya tidak. Selain dari pada patologi birokrasi salah satu masalah lainnya dalam menjalankan pelayanan publik adalah beban administrasi. Beban administratif awalnya didefinisikan sebagai pengalaman berat yang dirasakan oleh individu yang

⁷ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁸

diakibatkan oleh implementasi sebuah kebijakan.⁹ Jadi beban administrasi adalah beban yang ditimbulkan akibat interaksi antara warga dan pemerintah, beban tersebut menjadi pengaruh pada masyarakat terutama apakah suatu pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat, apakah suatu kebijakan publik sudah berhasil dan tepat sasaran dan adil untuk semua kalangan.

Donald Moynihan membagi beban administrasi kedalam tiga komponen yaitu beban pembelajaran, beban psikologis, dan juga beban pemenuhan.¹⁰ Pertama yaitu beban pembelajaran atau *learning cost*, beban pembelajaran sendiri adalah masalah yang kerap kali timbul pada saat melakukan program pelayanan publik yaitu tidak tahunya masyarakat tentang sebuah program pelayanan publik Individu sering kali tidak mengetahui tentang suatu program, apakah mereka apakah mereka memenuhi syarat, apa yang diperlukan untuk melakukannya, dan besarnya manfaat yang dipertaruhkan. Pengetahuan individu individu bervariasi di seluruh program, tetapi bahkan untuk program yang relatif menonjol dan berharga program, misalnya dalam survei penelitian yang dilakukan oleh Bhargava dan Manovi mendapatkan 43% orang yang layak untuk menerima bantuan dan sisanya meremehkan manfaat dari program tersebut.¹¹ Sedangkan sisanya mereka yang tidak tau mereka memenuhi syarat suatu program atau tidak namun bila mereka mengetahuinya maka mereka akan ikut dalam program tersebut.¹²

Analisis Terhadap Faktor Penyebab Beban Administrasi di Dinas ESDM Prov. Jateng

Beban administrasi adalah biaya yang terkait dengan operasi dan manajemen suatu perusahaan. beban ini berasal dari kebutuhan untuk mengelola dan mengawasi berbagai fungsi administratif dalam perusahaan. Biaya operasional dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jumlah karyawan, kompleksitas operasional, dan besar kecilnya bisnis perusahaan. Salah satu sumber tekanan administratif terbesar adalah jumlah karyawan. Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak pula karyawan yang dibutuhkan untuk menangani berbagai fungsi administrasi, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Biaya

⁹ Burden, Barry, David Canon, Kenneth Mayer, and Donald Moynihan. 2012. The effect of administrative burden on bureaucratic perception of policies: Evidence from election administration. *Public Administration Review* 72:741–51.

¹⁰ Moynihan, D., Herd, P. and Harvey, H. (2015) 'Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), pp. 43–69. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/muu009>.

¹¹ Bhargava, Saurabh and Dayanand Manoli. 2011. Why are benefits left on the table? Assessing the role of information, complexity, and stigma on take-up with an IRS field experiment. Working paper. <http://econweb.umd.edu/~davis/eventpapers/BhargavaBenefits.pdf> (accessed February 14, 2014).

¹² Baicker, Katherine, William Congdon, and Sendhil Mullainathan. 2012. Health insurance coverage and take-up: Lessons from behavioral economics. *Milbank Quarterly* 90 (1):107–34.

operasional akan meningkat, termasuk gaji karyawan, tunjangan dan biaya pelatihan.¹³

Kompleksitas organisasi meningkatkan tekanan organisasi. Perusahaan dengan operasi yang kompleks memerlukan sistem dan proses yang lebih kuat untuk mengelola berbagai aspek bisnis. Biaya operasionalnya pun akan meningkat, termasuk biaya teknologi informasi, biaya konsultasi, dan biaya pengembangan sistem. Selain itu, besar kecilnya usaha perusahaan juga mempengaruhi beban operasional. Perusahaan yang beroperasi dalam skala nasional atau internasional mempunyai beban administrasi yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang beroperasi dalam skala regional. Hal ini karena mereka harus mematuhi peraturan yang lebih ketat, mengelola rantai pasokan yang lebih kompleks, dan mengelola lebih banyak risiko.

Oleh karena itu, beban administrasi dapat bertambah karena jumlah karyawan, kompleksitas pekerjaan, dan besarnya usaha perusahaan. Untuk mengelola tekanan operasional, perusahaan harus memastikan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan manajemen proses bisnis yang efisien untuk meminimalkan biaya operasional.¹⁴

Ada juga beban administratif yang mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara. Tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari biaya administrasi dan umum menjalankan perusahaan, seperti gaji, layanan administrasi, dan biaya kantor. Dalam konteks pendidikan, tekanan administratif yang berlebihan terhadap guru dapat menghalangi mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuannya. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan publik dapat menimbulkan beban administratif yang mengancam keuangan atau perekonomian nasional. Faktor penyebab terjadinya bad governance dalam konteks pemerintahan antara lain adalah birokrasi yang mengambil alih kekuasaan dan kurang memperhatikan kemauan rakyat. Karena proses ini rumit dan memakan waktu, warga mungkin mengalami tekanan administratif.¹⁵

Di sisi lain, dalam konteks bisnis, biaya operasional mengacu pada biaya operasional dan overhead seperti gaji, layanan administrasi, biaya kantor, dll. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi beban masyarakat, apalagi jika perusahaan tidak dapat mengelolanya secara efisien. Oleh karena itu, beban administratif yang ditanggung masyarakat dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain biaya administratif dan, beban pembelajaran atas suatu layanan, dan kesalahan yang dilakukan oleh pejabat dan pemerintah. Di antara tindakan-tindakan untuk mengurangi beban administrasi yang dipertimbangkan oleh masyarakat, perbaikan

¹³ Edhonanta, Ariek. "Analisis Biaya-Volume-Laba Sebagai Alat Perencanaan Laba pada UD. Hartono Putra Balung Jember." *Analisis Biaya-Volume-Laba Sebagai Alat Perencanaan Laba pada UD. Hartono Putra Balung Jember*, 2013, p. 8.

¹⁴ estiasih, sofia pudji. "Bahan Ajar Akuntansi Manajemen." 2015, pp. 1-47. [https://repository.unipra.ac.id/89/9/Bahan Ajar AKuntansi MANajemen.pdf](https://repository.unipra.ac.id/89/9/Bahan%20Ajar%20AKuntansi%20MANajemen.pdf).

¹⁵ Theodoridis, Theodoros Kraemer, Juergen. "AKUNTANSI MANAJEMEN."

birokrasi, pengelolaan biaya administrasi dan umum yang efisien dan penyederhanaan prosedur administrasi menonjol.¹⁶

Biaya administrasi operasi mengacu pada biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis yang tidak berhubungan langsung dengan produksi atau penjualan. Biaya-biaya tersebut mencakup berbagai biaya, antara lain gaji karyawan, biaya kantor, peralatan, dan penyusutan properti. Beban operasional umum merupakan bagian dari beban usaha atau operasional dan merupakan pengorbanan langsung dari berkurangnya aset perusahaan. Contoh beban operasional umum adalah gaji karyawan. Karyawan seperti tim IT dan staf akuntansi juga terlibat dalam biaya administrasi. Selain itu, masa pakai dan biaya sudah termasuk dalam biaya pengoperasian. Beban lain-lain yang termasuk dalam kategori beban operasional umum antara lain premi asuransi, sewa gedung, utilitas, telepon, dan perlengkapan kantor. Beban umum dan operasional juga mencakup beban penyusutan, yang tersebar sepanjang umur ekonomis aset.¹⁷

Biaya administrasi umum memegang peranan penting dalam operasional suatu perusahaan. Biaya-biaya tersebut merupakan pengorbanan yang perlu bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Oleh karena itu, beban umum dan administrasi berkaitan erat dengan kegiatan administrasi seperti administrasi perkantoran, gaji pegawai, perlengkapan kantor, sewa, pemeliharaan kantor, dan beban pajak.

Tentu saja pengelolaan beban administrasi memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Bisnis harus memastikan bahwa beban administrasi dan operasional memenuhi anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan harus memantau dan meninjau biaya-biaya tersebut secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Dengan demikian, beban administrasi umum merupakan bagian yang penting dalam aktivitas operasional perusahaan. Pengelolaan beban administrasi umum yang baik akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya.¹⁸

Dalam konteks pelayanan publik, biaya operasional spesifik dapat merujuk pada biaya operasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Beban administrasi khusus ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan sosial, diantaranya termasuk biaya administrasi yang dikeluarkan dalam administrasi publik. Beberapa biaya administrasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat mencakup biaya-biaya seperti biaya administrasi pengurusan dokumen, biaya administrasi verifikasi data, biaya administrasi pengiriman dokumen, dan biaya administrasi pelayanan informasi.

¹⁶ Fathony, Aditya Achmad Rahayu, Yeni Tri. "Pengaruh Biaya Administrasi dan Umum Terhadap Laba Operasional Pada PT. Adhi Karya Tbk (Studi Empiris Pada Salah Satu Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 56-64.

¹⁷ Astrid Kanadya Maher. (n.d.). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Rasio Profitabilitas Pada Laporan Keuangan Umkm Rumah Warna. *Diponegoro Journal of Accounting*, (july), 1-22.

¹⁸ ana. (2019). *Mengelola Administrasi Gudang*. (1), 1-13.

https://www.academia.edu/15313200/MENGELOLA_ADMINISTRASI_GUDANG

Salah satu bentuk beban administrasi khusus pelayanan publik adalah biaya administrasi pengurusan dokumen. Biaya ini mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dokumen penting seperti akta kelahiran, akta kematian dan dokumen lain yang dibutuhkan masyarakat. Biaya administrasi pengurusan dokumen ini meliputi biaya pencetakan, biaya autentikasi, dan biaya pengiriman dokumen.¹⁹

Selain itu, biaya administrasi khusus juga sudah termasuk biaya penanganan verifikasi data. Biaya tersebut merupakan hasil proses verifikasi data yang dilakukan oleh badan layanan publik untuk menjamin keabsahan dan keakuratan data yang diberikan oleh masyarakat. Biaya administrasi verifikasi data ini meliputi biaya verifikasi keaslian dokumen, biaya pemeriksaan lapangan dan biaya administrasi lainnya yang berkaitan dengan proses verifikasi data. Biaya penanganan khusus juga merupakan biaya penanganan pengarsipan dokumen. Biaya tersebut digunakan untuk penerbitan dokumen resmi seperti kartu identitas, akta kelahiran, akta kematian dan dokumen lain yang diperlukan masyarakat. Biaya administrasi penerbitan dokumen ini meliputi biaya pencetakan, pengiriman dan biaya administrasi lainnya yang berkaitan dengan proses penerbitan dokumen tersebut.

Terakhir, beban administrasi khusus juga mencakup biaya operasional layanan informasi. Biaya-biaya tersebut timbul pada saat memberikan layanan informasi kepada masyarakat, termasuk biaya pengoperasian pusat informasi, biaya pelatihan personel layanan informasi, dan biaya administrasi lainnya yang terkait dengan pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan publik, beban administrasi spesifik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain biaya administrasi pengurusan dokumen, verifikasi data, penyerahan dokumen, dan pelayanan informasi. Beban administrasi khusus ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan baik bagi masyarakat.²⁰

Solusi dalam pengoptimalan operasional pada Dinas ESDM Prov Jateng

Upaya yang dapat dilakukan dalam langkah pengoptimalan operasional pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, terkhususnya untuk menekan risiko terjadinya beban administrasi yakni diantaranya;

a. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi dapat membantu dalam proses operasional agar lebih mudah, efisien dan tentunya bisa meminimalisir timbulnya beban administrasi yang tidak

¹⁹ Arum. P.S, Nima Sarifah, Jamilat Musafa Fawaz, Daffa. (2023). Etika dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 150-162. http://eprints.ipdn.ac.id/2264/1/jurnal_kalbar_des_2016.pdf

²⁰ LUKMAN, L. (2021). TENTANG PRAKTIK PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK)(Studi http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14579%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/14579/2/SKRIPSI_LUKMAN_1-2.pdf

diinginkan. Pengelolaan data, pencatatan, pelaporan, manajemen keuangan, dan segala keperluan administrasi lainnya dapat dibantu dan diintegrasikan dengan adanya teknologi dengan memanfaatkan sistem otomatisasi (E-Government). Dalam lingkup internal dinas, pengelolaan presensi serta evaluasi kinerja kepegawaian dilakukan melalui sistem HRM (*Human Resource Management*). Beberapa pemanfaatan teknologi oleh Dinas agar dapat membantu dalam penyelenggaraan operasional tugasnya yakni *application mobile* satu pintu serta kanal Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yakni masyarakat ataupun badan usaha dapat mengakses layanan administratif hingga mengajukan perizinan melalui online single submission tanpa perlu datang ke kantor dinas sehingga dapat menekan beban yang dikeluarkan. Interaksi dengan masyarakat ataupun badan usaha yang berhubungan dengan ESDM dapat lebih efisien dan fleksibel dengan adanya bantuan teknologi;

b. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Pemanfaatan teknologi sebagai upaya mengurangi beban administrasi, tentunya Dinas melakukan pelatihan bagi pegawainya untuk memberikan pemahaman penggunaan teknologi untuk pengelolaan administratif agar dapat berjalan baik dan lancar. Kemudian keterampilan manajemen waktu merupakan hal yang wajib dimiliki oleh para pegawai administrasi dalam menjalankan program kerja menuju capaian strategis, serta manajemen waktu dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ataupun badan usaha;

c. Kebijakan yang Efisien

Kebijakan yang efisien serta penyederhanaan prosedur administrasi birokrasi merupakan langkah yang dilakukan oleh Dinas dalam upaya menekan biaya yang timbul akibat adanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat ataupun pemerintah dengan badan usaha;

d. Monitoring dan Evaluasi Periodik

Kontrol berkesinambungan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Dinas demi terjaganya efisiensi dalam berjalannya program kerja yang efektif begitu pula evaluasi periodik sangat penting dilakukan bagi institusi untuk mengetahui skala keberhasilan beserta hal-hal yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur negara merupakan bentuk dari upaya perwujudan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Sebagai negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 tentu hak dan kewajiban negara terhadap rakyat ataupun sebaliknya harus selalu dalam posisi serasi, seimbang, dan selaras demi terwujudnya keteraturan dan kerukunan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, serta tidak menimbulkan beban administratif merupakan cita bagi institusi pemerintah.

Dalam studi ini disajikan wawasan akan dinamika pelayanan administratif di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam konteks beban administrasi (*administration burden*). Implikasi praktis yang dilakukan ins studi ini

berupa penyederhanaan proses administratif, penerapan teknologi informasi, dan peningkatan keterampilan pegawai sebagai strategi untuk mengatasi beban administrasi.

Studi ini menganalisis pelbagai faktor yang menjadi faktor adanya penghambat penyelenggaraan pemerintahan terkhusus timbulnya beban administrasi. Terdapat pula bentuk upaya yang dilakukan dinas sebagai institusi pemerintah guna mengefektifkan dan mengefisienkan operasional pemerintahan dengan mengurangi kompleksitas proses administratif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi dan inovasi administratif juga dapat memberikan wawasan tambahan dan solusi dalam menekan angka beban administratif yang rentan timbul.

Pada akhirnya dalam implementasi kebijakan, direkomendasikan agar institusi pemerintah dapat mengedepankan penyederhanaan dalam prosesural, akses partisipasi masyarakat demi kemajuan, dan monitoring-evaluasi rutin terhadap proses administratif. Penerapan praktik-praktik efektif dengan mengedepankan efisiensi sebagaimana Dinas yang diulas pada studi ini dapat menjadi acuan bersama lembaga pemerintahan dalam mewujudkan operasional tanpa timbul beban administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Atmosudirjo, S. Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi Seri Pustaka Ilmu Administrasi Negara VII*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Burden, Barry, David Canon, Kenneth Mayer, and Donald Moynihan. 2012. The effect of administrative burden on bureaucratic perception of policies: Evidence from election administration. *Public Administration Review* 72:741–51

Cane, Peter. 2011. *Administrative Law Fifth Edition*. Oxford: Oxford University Press.

De Smith, S. A. 1959. *Judicial Review of Administrative Action*. London: Stevens & Sons Limited.

Foulkes, David. 1986. *Administrative Law Sixth Edition*. London: Butterworths.

Moynihan, D., Herd, P. and Harvey, H. (2015) 'Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), pp. 43–69. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/muu009>.

Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Phillips, O. Hood dan Paul Jackson. 1987. *Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet & Maxwell Ltd.

Plesueur, A. dan Werberg, J. 1993. *Constitutional and Administrative Law*. Oxford: Cavendish Publishing

Prijodarminto, Soegeng, Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011
- Sinamo, Nomense, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
- SF Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta, FH UII Press, 2015.
- Sjahchran Basah. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung, Alumni, 1989.
- Sjachran Basah. Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Orasi Ilmiah, Unpad, 1986.
- Sjahran Basah. Beberapa Permasalahan Pokok Bertalian dengan Terbentuknya Peradilan Administrasi, Bunga Rampai HTN dan HAN, Jurusan HTN, FH.UII, Yogyakarta, 1987
- Utrecht, E. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichthisar
- Wade, H. W. R. 1971. Administrative Law. Oxford: Clarendon Press.